



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KANTOR KECAMATAN NGADIREJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Semangat reformasi sebagaimana dituangkan dalam regulasi otonomi daerah, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik, sehingga apa yang disebut **Good Governance** dapat tercapai. Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dituntut oleh masyarakat atau lembaga-lembaga non pemerintah, akan tetapi **keterbukaan (transparansi)** selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak, termasuk di dalamnya para penyelenggara pemerintahan negara, mulai dari pusat, propinsi, pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintahan unit terkecil yaitu desa. Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah laporan keuangan pemerintah yang **disusun** dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berterima umum dan **disampaikan** tepat waktu.

Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, khususnya di Kantor Kecamatan Ngadirejo terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari disusunnya Laporan Keuangan adalah guna memberikan informasi secara nyata tentang realisasi anggaran, neraca, arus kas, beserta catatan laporan keuangan kepada pengguna yaitu masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020;

BAB II

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk OPD Kantor Kecamatan Ngadirejo bukan merupakan OPD yang memiliki kegiatan memungut/ pendapatan, seluruh anggaran yang diterima merupakan bersumber dari Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung dan dari APBN, sehingga tidak ada rekening realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dapat kami sampaikan.

BELANJA

Realisasi APBD Tahun 2020 bagi Kecamatan Ngadirejo sesuai Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2020 Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Realisasi APBD Tahun 2020
Kantor Kecamatan Ngadirejo

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	% realisasi
I. Belanja Tidak Langsung			
a. Belanja Pegawai	2.806.392.046,00	2.645.572.969,00	94.27
II. Belanja Langsung	641.082.100,00	595.236.514,00	92.85
a. Belanja Pegawai	130.250.000,00	119.144.000,00	91.47
b. Belanja Barang dan Jasa	328.711.600,00	294.698.834,00	89.65
c. Belanja Modal	182.120.500,00	181.393.680,00	99.56
Jumlah	3.447.474.146,00	3.240.809.483,00	94.01

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Kecamatan Ngadirejo Tahun 2020

Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2020 Kantor Kecamatan Ngadirejo, untuk belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 2.645.572.969,00 atau 94.27 % dari anggaran sebesar Rp. 2.806.392.046,00. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan kami dalam merencanakan penghitungan gaji seperti, adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan gaji pokok yang tidak bisa diprediksi, adanya pegawai yang pensiun maupun adanya refocusing anggaran akibat dari Pandemi Covid – 19 yang

terjadi diawal tahun ini, sehingga menyebabkan realisasi anggaran belanja tidak langsung dari tahun ke tahun tidak sesuai dengan target anggaran.

Untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 595.236.514,00 dari anggaran sebesar Rp. 641.082.100,00 Sehingga terdapat prosentase penggunaan dana yang terealisasikan sebesar 92.85 % dari anggaran yang disediakan.

a. Pelaksanaan APBD Tahun 2020

Pada tahun 2020 kantor kecamatan Ngadirejo mendapatkan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 641.082.100,00, namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 595.236.514,00 atau (92.85 %), sehingga terdapat selisih sebanyak Rp. – 206.664.663,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal kantor kecamatan ngadirejo meliputi Belanja modal pengadaan perlengkapan gedung kantor seperti yang tertuang ditabel di bawah ini:

Tabel 1.2

Belanja Modal Kantor Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2020

Belanja Modal	2020	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja modal Perlengkapan Kantor	914.000	914.000
Belanja modal Komputer	4.500.000	4.500.000
Belanja modal Mebelair	3.150.000	3.150.000
Belanja modal Peralatan Dapur	3.056.500	3.056.500
Belanja modal Alat-alat studio	5.500.000	5.500.000
Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	165.000.000	164.273.180
JUMLAH	182.120.500	181.393.680

Realisasi Belanja Modal TA 2020 sebesar Rp. 181.393.680,00 atau 99.60% dari anggaran sebesar Rp. 182.120.500,00

B. PENJELASAN LAPORAN NERACA

ASET

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas :	2019	2020
	Rp	Rp
a. Kas di Kas Daerah		
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
c. Kas di Bendahara Penerimaan		
d. Investasi Jangka Pendek		
Jumlah Kas dan Setara Kas	0	0

a. Kas di Kas Daerah

-

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) per tanggal 31 Desember 2020 sebesar **Rp 0.00**, karena sisa anggaran yang tidak terserap sudah disetorkan pada tanggal 31 Desember 2020. dengan rincian sebagai berikut :

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan sisa UP/GU/TU:	2019	2020
	Rp	Rp
1) Sisa GU	4.161.818	717
2) Sisa TU	11.252.112	947.500
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	15.413.930	948.217

c. Kas di Bendahara Penerimaan

-

2. Piutang

-

3. Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis kecamatan ngadirejo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

SISA BARANG				KET
JML	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
6	Kertas HVS 70 gr	56.000	336.000	
3	Odner	22.000	66.000	
10	Stopmap Kertas	1.200	12.000	
5	Stopmap Plastik	10.000	50.000	
20	Snelhacter kertas	1.200	24.000	
15	Snalhecter Plastik	10.000	150.000	
4	Ballpoint Biasa	2.000	8.000	
1	Spidol Permanent	10.000	10.000	
2	Spidol Kecil	1.500	3.000	
2	Pensil hitam	4.500	9.000	
7	Isi Staples Kecil	2.000	14.000	
3	Isi Staples besar	4.000	12.000	
1	Cutter Besar	17.5000	17.500	
1	Tinta Printer	120.000	120.000	
8	Dos Arsip	20.000	160.000	
2	Trigonalo Klip Kecil	3.000	6.000	
			997.500	

50	Amplop Kop dinas Panjang	500	25.000	
2	Buku Kwitansi Dinas	25.000	50.000	
1	Buku Kendali Keluar	37.500	37.500	
1	Buku Kendali Masuk	35.000	35.000	
1	Tanda Bukti pengeluaran	25.000	25.000	
3	Tanda Bukti Penerimaan	25.000	75.000	
20	Plat IMB	25.000	500.000	
			747.500	
10	Gelas Panjang	17.500	175.000	
5	Gelas Panjang	10.500	52.500	
95	Sendok Makan	55.000	275.000	
20	Sendok Garpu	15.000	300.000	
46	Piring Ceper	14.000	644.000	
5	Piring Makan	132.000	660.000	
5	Piring	190.000	950.000	
1	Tempat Prasmanan	914.000	914.000	
			3.970.500	

4. Investasi Jangka Panjang

-

5. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2019 dan 2020, tersaji sebagai berikut :

Aset tetap :	2019	2020
	Rp	Rp
a. Tanah	461.453.230	461.453.230
b. Peralatan dan Mesin	1.159.118.875	1.190.869.875.00
c. Gedung dan Bangunan	949.659.000	1.113.932.180.00
d. Jalan, jaringan dan instalasi	1.712.600	1.712.600
e. Aset Tetap Lainnya	3.066.500	3.066.500
f. Akumulasi Penyusutan	(1.075.978.451.29)	(1.075.978.451.29)
g. Aset Lainnya	26.450.000	26.450.000
Jumlah Aset Tetap	2.608.406.205.00	2.807.138.385.00

Sedangkan mutasi Aset Tetap dalam 2020 penambahan belanja modal, hibah sebesar Rp 198.732.180. Jumlah aset tetap per tanggal 31 Desember 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ikhtisar mutasi selama Tahun 2020

Aktiva Tetap	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
a. Tanah	461.453.230	0		461.453.230
b. Peralatan dan Mesin	1.158.320.375	32.549.500	0	1.190.869.875,00
c. Gedung Bangunan	949.659.000	0	0	949.659.000
d. Jalan, jaringan dan instalasi	1.712.600	0	0	1.712.600
e. Aset Tetap Lainnya	3.066.500	0	0	3.066.500
f. Akumulasi Penyusutan	(1.207.799.258,51)	0	0	(1.207.799.258,51)
g. Aset Lainnya	26.450.000	0	0	26.450.000
Jumlah	1.481.145.753,71	32.549.500		

Saldo akhir Aset Tetap TA 2020 sebesar Rp 1.499.194.753,71 yang disajikan di Neraca merupakan hasil mutasi dari belanja modal TA 2019 (Neraca Awal) sampai dengan TA 2020, sehingga atas penyajian Saldo Aset Tetap tersebut hanya berdasarkan mutasi penambahan dan pengurangan dari realisasi belanja modal yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Temanggung, penghapusan maupun koreksi hasil audit. Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tanah

Tidak ada mutasi aset Tanah pada tahun 2020 ini. Masih sama seperti tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 461.453.230,00

b. Peralatan dan Mesin

Penilaian atas Peralatan dan Mesin dalam rangka penyusunan neraca awal, didasarkan pada Nilai Perolehan/ Pembelian. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 1.158.320.375,00 dan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.190.869.875,00

Saldo Peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp 1.190.869.875,00 termasuk aset tahun 2019 ditambah penambahan mutasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 32.549.500,00. Penambahan sebesar Rp 32.549.500,00. Berasal dari penambahan modal hibah sepeda motor senilai Rp 18.700.000,00 dan speaker Rp 300.000,00, belanja modal senilai Rp 17.120.500,00, dimana terdapat belanja modal menjadi persediaan sebesar Rp 4.571.000,00. Belanja modal yang

menjadi persediaan antara lain Pengadaan Perlengkapan Kantor, Pengadaan Peralatan Dapur

c. Gedung dan Bangunan

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas aset gedung dan bangunan didasarkan pada Nilai perolehan/pembelian pada tanggal neraca awal. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 949.659.000,00 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.113.932.180,00 penambahan ini berasal dari belanja pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor yaitu Rehab Aula sebesar Rp 164.273.180,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas aset jalan ,Irigasi dan Jaringan didasarkan pada Nilai perolehan/pembelian pada tanggal neraca awal. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 dan 2020 masing-masing sejumlah Rp. 1.712.600 dan 1.712.600

e. Aset Tetap Lainnya

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas aset tetap lainnya didasarkan pada Nilai perolehan/pembelian pada tanggal neraca awal. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 3.066.500,- dan Rp 3.066.500,-

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan (A.P) merupakan Penyusutan dari masing aset tetap, berdasarkan ini akuntansi dan standart penyusutan.

Nilai A.P per 31 Desember 2020 sebesar (1.207.799.258,51)

g. Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset rusak yang belum atau sedang proses penghapusan. Jumlah aset lainnya per 31 desember 2020 sebesar Rp. 26.450.000,00

6. Dana Cadangan

-

KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek itu merupakan Utang Belanja Tambahan penghasilan Pegawai (TPP) bulan desember 2020 yang belum dibayarkan per 31 desember 2020 sebesar Rp. 73.974.108,00, serta utang belanja jasa kantor yang telah dipakai pada bulan Desember 2020, tetapi baru bisa dibayarkan pada tahun 2020, sebesar Rp. 36.663.549,00 sehingga total kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 77.637.657,00

EKUITAS DANA

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih meliputi Ekuitas Dana Lancar (EDL), Ekuitas Dana Investasi (EDI) dan Ekuitas Dana Cadangan (EDC). Saldo per 31 Desember 2019 dan 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Ekuitas Dana :	2019 Rp	2020 Rp
1. Ekuitas Dana Lancar (EDL)	2.081.600	5.715.500,00
2. Ekuitas Dana Investasi (EDI)	1.499.194.753,71	1.491.312.969,00
3. Ekuitas Dana Cadangan (EDC)		
Jumlah ekuitas dana	1.501.276.353,71	1.568.950.626,49

Saldo-saldo akun Ekuitas dana per 31 Desember 2019 dan 2020 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ekuitas Dana Lancar (EDL)

Saldo akun ini merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek, dengan rincian sebagai berikut:

Ekuitas Dana Lancar (EDL) :	2019 Rp	2020 Rp
a). SILPA	0	0
b). Pajak yang belum disetor.		
c). Persediaan	2.081.600	5.715.500,00
Jumlah EDL	2.081.660	5.715.500,00

Jumlah Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2019 dan 2020 sebesar Rp 2.081.600 dan Rp 5.715.000 dapat dijelaskan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Aktiva Lancar:	2019	2020
	Rp	Rp
a. Kas di Kas Daerah		
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
d. Piutang Pajak	0,00	0,00
e. Piutang Lain – lain	0,00	0,00
f. Bagian Lancar TP-TGR	0,00	0,00
g. Persediaan	2.081.600	5.715.500
Jumlah	2.081.600	5.715.500

Dikurangi:	2019	2020
Hutang Jangka Pendek:	Rp	Rp
a. Utang PFK	0	0
b. Utang Jangka Pendek lainnya	72.747.606,00	77.637.657,00
Jumlah	72.747.606,00	77.637.657,00
EDL	48.973.454,00	77.637.657,00

2. *Ekuitas Dana Investasi (EDI)*

Saldo akun ini merupakan kekayaan yang berasal dari selisih investasi permanen ditambah aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 sebagai berikut:

Ekuitas Dana Investasi (EDI) :	2019	2020
	Rp	Rp
a. Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	0,00	0,00
b. Diinvestasikan dlm aset tetap	1.499.194.753,71	1.491.312.969,49
c. Diinvestasikan dalam aset lainnya	0,00	0,00
d. Dana yg harus disediakan utk pembayaran htg jgk panjang	0,00	0,00
Jumlah EDI	1.499.194.753,71	1.491.312.969,49

Jumlah Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2019 dan 2020 sebesar Rp 1.499.194.753,71 dan Rp 1.491.312.969,49 dijelaskan dengan rincian perhitungan berikut :

Investasi dan Aset :	2019	2020
	Rp	Rp
a. Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
b. Aset Tetap	1.481.145.753,71	1.499.194.753,71
c. Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	1.481.145.753,71	1.499.194.753,71

Dikurangi:

Kewajiban Jangka Panjang:	2019	2020
	Rp	Rp
Hutang Dalam Negeri- PP	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00
EDI	1.481.145.753,71	1.499.194.753,71

3. Ekuitas Dana Dicadangkan (EDC)

-

C. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan penjelasan penggunaan anggaran tahun 2020 Terhadap beban operasi yang dilaksanakan.

Beban operasi pada TA. 2020 sebesar Rp. 3.064.904.454,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Beban Operasi:	2020
	Rp 3.065.254.454,00
a. Beban Pegawai	2.768.984.677,00
b. Beban Barang dan Jasa	296.269.777,00
SURPLUS DEFISIT	<u>(3.064.904.454,00)</u>

Jadi Beban Operasi TA. 2020 sebesar Rp. 3.371.543.533 merupakan gabungan dari Beban pegawai, beban barang dan jasa. Yang kesemuanya itu merupakan transfer dari Pemkab. Temanggung. Bukan dari hasil pendapatan OPD, karena OPD Kec. Ngadirejo bukan merupakan OPD yang memperoleh pendapatan.

D. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas TA. 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
a. Ekuitas Awal	1.296.707.940,49
b. Surplus/Defisit LO	(3.064.904.454,00)
c. Koreksi Kesalahan. Perubahan Kebijakan Akuntansi	18.700.000,00
d. Ekuitas Untuk di konsolidasikan	3.240.809.483,00
Jumlah EDI	1.491.312.969,49

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah ekuitas awal sebesar Rp. 1.296.707.940,49 selama TA. 2020 terdapat perubahan Beban operasi sebesar Rp. (3.064.904.454,00), sehingga Ekuitas untuk dikonsolidasikan menjadi sebesar Rp. 3.240.809.483,00

Ekuitas akhirnya menjadi sebesar Rp. **1.491.312.969,49**

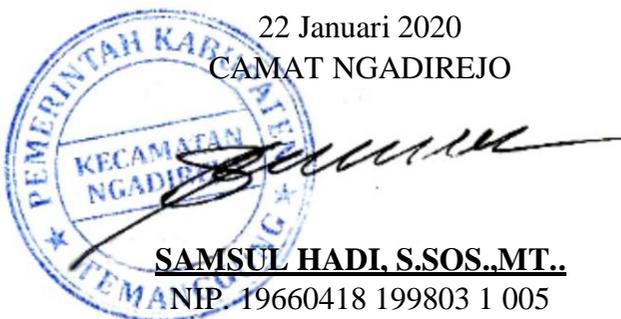
BAB III

PENUTUP

Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi: **partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas, serta profesionalisme.**

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2020 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan Sumber daya manusia dalam menangkap aspirasi dan kreasi masyarakat maupun dalam teknis pelaksanaannya.

22 Januari 2020
CAMAT NGADIREJO



SAMSUL HADI, S.SOS.,MT.
NIP. 19660418 199803 1 005